

**SOSIALISASI E-VOTING PADA  
PEMILIHAN KEPALA PEKON  
di KABUPATEN PRINGSEWU**

**Tesis  
Oleh**

**HARIZ A'RIFA'I  
NPM 2126031006**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**SOSIALISASI E-VOTING PADA  
PEMILIHAN KEPALA PEKON  
di KABUPATEN PRINGSEWU**

**Oleh**

**HARIZ A'RIFA'I**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER ILMU KOMUNIKASI**

**Pada**

**Program Magister Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **SOSIALISASI E-VOTING PADA PEMILIHAN KEPALA PEKON di KABUPATEN PRINGSEWU**

Kabupaten Pringsewu berhasil melaksanakan pemilihan kepala pekon secara E-Voting di 19 pekon dengan sukses dan tanpa sengketa hasil. Kolaborasi intensif antara Pemerintah Kabupaten, kecamatan, dan pekon dalam melakukan sosialisasi menjadi kunci kesuksesan, terutama mengingat masyarakat menghadapi mekanisme ini untuk pertama kali. Sosialisasi dalam konteks penyelenggaraan pemilihan E-Voting adalah upaya untuk memperkenalkan sebuah sistem pemilihan yang meliputi berbagai aspek, seperti penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), prosedur pemilihan, landasan hukum, dan teknis lainnya, kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui bagaimana kegiatan sosialisasi E-Voting dengan kekurangan dan kelebihan serta mengidentifikasi bagaimana pola penyampaian pesan yang terbentuk dalam sosialisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teoretis difusi inovasi, dengan hasil yang mengungkapkan tahapan, proses, saluran komunikasi, dan peran dimensi waktu dalam sosialisasi E-Voting. Penelitian ini menggambarkan proses sosialisasi E-Voting pada pemilihan kepala pekon di Kabupaten Pringsewu, melibatkan tahapan persiapan awal, komunikasi intensif, dan adaptasi masyarakat. Tahap awal mencakup strategi sosialisasi menggunakan video tutorial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap inovasi E-Voting sebagai langkah menuju efisiensi dalam pemilihan kepala pekon. Proses sosialisasi didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, pengurus masjid, dan pemerintahan desa, memastikan penerimaan inovasi tanpa melanggar nilai-nilai sosial dan budaya. Saluran komunikasi melibatkan media resmi pemerintah dan sosial, serta pertemuan langsung di tempat-tempat strategis seperti masjid dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dimensi waktu memainkan peran penting, dengan persiapan inovasi dimulai sejak 2019 dan sosialisasi teknis intensif setelah regulasi diterbitkan pada tahun 2022. Analisis juga mengidentifikasi hambatan-hambatan, termasuk kurangnya keterampilan SDM, keterbatasan waktu, masalah EKTP, dan kesulitan orang lanjut usia. Kesimpulannya, kesuksesan implementasi inovasi bergantung pada kesiapan SDM, manajemen waktu, pemeliharaan teknis, dan pendekatan khusus terhadap kelompok masyarakat tertentu.

**Kata Kunci : Pola Komunikasi, Sosialisasi E-Voting**

## **ABSTRACT**

### **E-VOTING SOCIALIZATION AT THE VILLAGE HEAD ELECTION IN PRINGSEWU DISTRICT**

The Pringsewu Regency successfully conducted the E-Voting system for the election of village heads in 19 villages, achieving success without any disputes over the results. The intensive collaboration among the Regency Government, sub-districts, and villages in conducting the socialization played a key role in this success, especially considering that the community was facing this mechanism for the first time. Socialization in the context of organizing E-Voting elections is an effort to introduce an election system that encompasses various aspects, such as the preparation of the Permanent Voter List (DPT), election procedures, legal foundations, and technical details, to the community. The objective of this research is to understand the activities of E-Voting socialization, including its shortcomings and advantages, and to identify the patterns of message delivery formed during the socialization. This research adopts a qualitative approach with the theoretical framework of innovation diffusion, revealing stages, processes, communication channels, and the role of time dimensions in E-Voting socialization. The study illustrates the process of E-Voting socialization in the election of village heads in Pringsewu Regency, involving initial preparation stages, intensive communication, and community adaptation. The initial stage includes socialization strategies using video tutorials to enhance the community's understanding of E-Voting innovation as a step towards efficiency in electing village heads. The socialization process is supported by community figures, including religious leaders, mosque administrators, and village government officials, ensuring the innovation's acceptance without violating social and cultural values. Communication channels involve official government and social media, as well as direct meetings in strategic locations such as mosques and Polling Stations (TPS). The time dimension plays a crucial role, with innovation preparations starting in 2019 and intensive technical socialization after regulations were issued in 2022. The analysis also identifies obstacles, including a lack of human resource skills, time limitations, E-KTP issues, and difficulties faced by the elderly. In conclusion, the success of innovation implementation depends on human resource readiness, time management, technical maintenance, and a targeted approach to specific community groups.

**Keywords : Communication patterns, E-Voting Socialization**

Judul Tesis : **SOSIALISASI E-VOTING PADA PEMILIHAN  
KEPALA PEKON DI KABUPATEN  
PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : **Hariz A'Rifa'i**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2126031006

Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



  
**Dr. Nanang Trenggono, M.Si.**  
NIP. 196212041989021001

  
**Prof. Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si.**  
NIP. 196207161988031001

**MENGETAHUI**

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi**

  
**Prof. Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si.**  
NIP. 196207161988031001

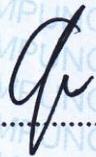
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Nanang Trenggono, M.Si.**



**Sekretaris : Prof. Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si.**



**Penguji Utama : Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 196108071987032001

**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 196403261989021001

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 18 Desember 2023**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hariz A'Rifa'i  
NPM : 2126031006  
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi  
Jurusan : Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul "Sosialisasi E-Voting Pada Pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu" tersebut adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk dari sumbernya dan telah saya sebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 November 2023  
Yang membuat pernyataan



Hariz A'Rifa'i  
NPM 2126031006

## RIWAYAT HIDUP



Hariz A'Rifa'i, lahir di Jatimulyo pada 08 Februari 1993. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak Ponidi dan Sunarti. Peneliti mengenyam sekolah dasar di SDN 2 Jatimulyo, mengenyam sekolah menengah pertama di SMPN 21 Bandar Lampung. Mengenyam sekolah menengah atas di SMK AL-HUDA, Kec. Jati Agung, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Program Studi Pendidikan Matematika. Pada tahun 2019, peneliti berhasil menyelesaikan studinya dan meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). Sembari menjalankan pendidikan Strata 1 (S1), peneliti bekerja di Kementerian Pertahanan Kanwil Lampung sampai tahun 2019 dan sekarang bekerja di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai Tenaga Pendamping Profesional. Peneliti kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2 (S2) di Universitas Lampung dengan memilih Program Studi Magister Ilmu Komunikasi.

## **MOTTO**

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan ." (Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Jangan biarkan hatimu pergi darimu, kecuali pikiranmu mempunyai kaki dan menjauhimu.”

(Patrick Star)

## **PERSEMBAHAN**

Hasil karya ini dipersembahkan kepada:  
Ibundaku Tercinta Sunarti dan Ayahandaku Tercinta Bapak Ponidi  
Juga untuk kedua Kakakku Feriyanti dan Wahid Amrullah  
Serta Adikku Tersayang Zahro Aisiah

Terimakasih atas dukungan, motivasi, kesabaran dan do'a yang selalu tersemat sehingga penulis dapat mencapai keberhasilan ini.

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan kehendak-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Sosialisasi E-Voting Pada Pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu” ini dengan baik. Dengan berbekal keyakinan dan kerja keras, bimbingan dan ridho dari Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Melalui kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberi dukungan moril maupun spiritual. Dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat terutama kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. Andy Corry Wardhani, M.Si., Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus Pembimbing Akademik dan Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
5. Bapak Dr. Nanang Trenggono, M.Si selaku Pembimbing Pertama yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
6. Bapak Dr. Abdul Firman Ashaf, M.Si., selaku Pembahas sekaligus Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Ilmu Komunikasi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat;
8. Mbak Febri dan Mbak Vivi selaku Staff di Program Studi Magister Ilmu Komunikasi yang senantiasa dengan keikhlasan hati membantu berbagai proses administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Lampung;
9. Jajaran Pimpinan Dinas PMP Kabupaten Pringsewu, Aparatur Pekon Wonodadi dan Keputran yang telah mendukung, mengizinkan dan memberikan kesempatan penulis melakukan penelitian ini;
10. Bapak Dr. H. Puji Rahardjo, S.Ag selaku Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung, dan Ahmad Syarifudin Kakanda yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasinya selama penulis menempuh pendidikan;
11. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Lampung angkatan 2021 yang senantiasa saling mendukung dan memberi semangat dari awal kuliah hingga akhir;
12. Sahabat-Sahabati, Rahmat Andri Setiawan, M.Pd., Rizky Septianto, S.Pd., Syaiful Huda S.Pd., Diyah Dwi Darmi, S.Pd., yang selalu mendukung dan terlibat dalam berjalannya proses pendidikan yang penulis jalani hingga sampai di titik ini.
13. Siti Sarohmawati, S.I.Kom., Aulia Fitri Khairina, M.Ikom., Zaka Maulana Ahsan, S.I.Kom., Sahabatku tersayang, tercantik dan terganteng, pemberi kesan terbaik;
14. Keluarga besar Kementerian Desa PDTT Provinsi Lampung, lingkungan peneliti belajar dan berkarier.

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengharapkan adanya saran, masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, paling tidak, bagi diri penulis sendiri.

Bandar Lampung, 2023

**Hariz A'Rifa'i**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

**ABSTRAK ..... i**

**DAFTAR ISI..... iii**

**DAFTAR TABEL ..... iv**

**DAFTAR GAMBAR ..... v**

### **I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 7

1.3 Tujuan Penelitian ..... 7

1.4 Manfaat Penelitian ..... 7

1.5 Kerangka Pemikiran..... 8

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Penelitian Terdahulu ..... 10

2.2 Sosialisasi..... 14

2.2.1 Pengertian Sosialisasi..... 15

2.2.2 Penggunaan Media dalam Proses Sosialisasi..... 14

2.2.3 Penyampaian Pesan dalam Sosialisasi ..... 17

2.3 Kegiatan Sosialisasi E-Voting dalam Pemilihan Kepala Pekon ..... 19

### **III. METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian ..... 30

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ..... 30

3.3 Sumber Data.....	30
3.4 Informasi Penelitian .....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Validasi Data.....	33
3.7 Teknik Analisa Data .....	33
3.8 Keabsahan Data.....	34

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil .....	36
4.1.1 Profil Kabupaten Pringsewu .....	36
4.1.2 Gambaran Umum Desa Wonodadi .....	37
4.1.3 Gambaran Umum Pekon Kaputran .....	38
4.1.4 Pemilihan Kepala Pekon E-Voting .....	39
4.1.5 Latar Belakang Inovasi Pemilihan Kepala Pekon E-Voting ..	41
4.1.6 Cara Kerja Pemilihan E-Voting .....	42
4.1.7 Strategi Sosialisasi Pemilihan Kepala Pekon E-Voting .....	47
4.1.8 Hambatan .....	53
4.2 Pembahasan.....	55
4.2.1 Tahap Awal .....	56
4.2.2 Proses.....	57
4.2.3 Koneskuensi.....	61
4.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Sosialisasi .....	62
4.2.5 Pola Penyampaian Pesan .....	67

#### **V. Simpulan dan Saran**

5.1 Simpulan .....	69
5.1.1 Proses Sosialisasi E-Voting.....	69
5.1.2 Kelebihan dan Kekurangan .....	70
5.1.3 Pola Penyampaian Pesan Sosialisasi E-Voting .....	70
5.2 Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Kategori e-voting dari negara-negara pemilihan menggunakan e-voting .....	2
<b>Tabel 1.2</b> Daftar pekon yang melaksanakan pilkakon serentak secara e-voting.....	5
<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Sejenis .....	10
<b>Tabel 2.2</b> Gap Research .....	13
<b>Tabel 3.1</b> Informan Penelitian .....	31
<b>Tabel 4.1</b> Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Pringsewu .....	36
<b>Tabel 4.2</b> Pekon Yang Melaksanakan E-Voting .....	40

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Kerangka Pemikiran .....	8
<b>Gambar 2.1</b> Model Komunikasi Aristoteles .....	21
<b>Gambar 2.2</b> Formula Laswell .....	23
<b>Gambar 2.3</b> Model Sirkuler Osgood dan Schramm .....	25
<b>Gambar 4.1</b> Bagan Pemerintahan Pekon Wonodadi .....	38
<b>Gambar 4.2</b> Bagan Pemerintahan Pekon Keputran .....	39
<b>Gambar 4.3</b> Registrasi Pemilihan .....	44
<b>Gambar 4.4</b> Layar Tapping dan Pemilihan.....	45
<b>Gambar 4.5</b> Bilik Pemilih.....	45
<b>Gambar 4.6</b> Proses Memasukan Struk Pemilihan .....	46
<b>Gambar 4.7</b> Foto Selfie.....	46
<b>Gambar 4.8</b> Banner Pengumuman Pilkakon E-Voting.....	51
<b>Gambar 4.9</b> Sosialisasi Dinas PMP .....	52
<b>Gambar 4.10</b> Bagan Pola Komunikasi .....	67

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika pemerintahan tingkat desa. Kepala Desa tidak hanya merupakan figur pemimpin lokal, tetapi juga menjadi perwakilan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk desa. Oleh karena itu, integritas, kompetensi, dan legitimasi proses pemilihan kepala desa menjadi faktor penentu dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Meskipun tujuan dari pemilihan kepala desa adalah untuk menciptakan kepemimpinan yang mewakili keinginan mayoritas masyarakat, seringkali proses tersebut diwarnai oleh sejumlah tantangan yang dapat mengganggu kelancaran dan keadilan. Beberapa tantangan tersebut melibatkan masalah dalam proses pemilihan, potensi kecurangan, intimidasi, dan pelanggaran etika dalam arena politik desa.

Tantangan dalam proses pemilihan kepala desa sering kali berujung pada munculnya sengketa hasil. Sengketa ini dapat timbul karena ketidakpuasan terhadap proses pemilihan yang dianggap tidak adil, adanya pelanggaran etika selama masa kampanye, atau dugaan kecurangan dalam perhitungan suara. Hal ini menjadi nyata dalam Pemilihan Peratin (Kepala Desa) di Kabupaten Pesisir Barat yang dilaksanakan secara serentak, di mana dari 68 Peratin yang diikuti, hanya 62 Peratin yang berhasil dilantik. Lima Peratin lainnya mengalami penundaan pelantikan karena adanya sanggahan terkait pelaksanaan pemilihan yang disinyalir bekerjasama dengan panitia tanpa membagikan undangan pemilihan kepada warga secara sengaja. (Lampost, 2022).

Tantangan seperti ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya serius untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan keadilan dalam proses pemilihan kepala desa. Langkah-langkah perbaikan dan pembenahan sistem perlu diterapkan agar masyarakat desa dapat memiliki keyakinan penuh terhadap hasil pemilihan.

Era digital telah menghadirkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilihan kepemimpinan. Salah satu implementasi dari e-government adalah penerapan teknologi digital dalam pemungutan suara yang dikenal sebagai electronic voting (E-Voting). E-Voting merupakan metode pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan menggunakan teknologi elektronik. Menurut The Council of Europe (CoE), E-Voting adalah perangkat pemberian suara secara elektronik yang memiliki potensi untuk mempercepat tabulasi data, mengurangi biaya pemilihan, dan mencegah pemilih yang tidak berhak. Penggunaan E-Voting pertama kali dicatat pada pemilihan presiden di Amerika Serikat pada tahun 1964 dengan menggunakan sistem kartu berlubang (punched card system) (Risnanto, 2017).

Hingga saat ini, banyak negara di seluruh dunia telah mengadopsi berbagai bentuk E-Voting. Menurut data dari ACE Project hingga bulan Januari, 43 negara telah mengadopsi E-Voting dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan mesin pemilihan hingga pemungutan suara melalui internet (Endriyanto, 2010).

**Tabel 1.1**

Kategori E-Votting	Negara
E-Voting dengan mesin pemilihan	Australia, Brazil, Canada, Prancis, India, Jepang, Kazakhstan, Peru, Rusia, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Venezuela
E-Voting dengan Internet Voting Austria, Australia, Kanada, Estonia, Perancis, Jepang, Swiss Perencanaan, dan Percobaan Evoting	Argentina, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Chili, Republik Ceko, Finlandia, Yunani, Italia, Latvia Lithuania, Meksiko, Nepal, Nigeria, Norwegia, Polandia, Portugal,

	Rumania, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Korea Selatan, Swedia
Pelaksanaan E-Voting dihentikan	Jerman, Irlandia, Belanda, Inggris

Penerapan E-Voting di Indonesia sebagai salah satu metode pemungutan suara, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.147/PUU-VII/2009, telah membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilihan kepala desa. Implementasi pertama E-Voting di Indonesia terjadi pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tahun 2009. Keputusan ini memberikan beberapa keuntungan, termasuk efisiensi waktu dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, serta potensi untuk mengurangi konflik pasca-pemilihan. Namun, E-Voting juga dihadapi oleh sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah kehilangan hak pilih oleh warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Selain itu, kendala dalam memfasilitasi pemilih dengan kebutuhan khusus, seperti tunanetra, juga menjadi isu yang perlu diatasi (Ihksan Darmawan dkk, 2014).

Penerapan E-Voting membawa perubahan signifikan dalam proses pemilihan kepala desa, termasuk dalam hal sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi langkah awal yang krusial dalam memperkenalkan dan mempersiapkan masyarakat terhadap penggunaan hak pilih, teknis pemilihan, dan keamanan sistem E-Voting. Sosialisasi juga berperan penting dalam mengatasi potensi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem baru ini. Namun, selama pelaksanaan E-Voting di berbagai wilayah Indonesia, berbagai persoalan mendasar muncul, seperti kehilangan hak pilih akibat belum memiliki KTP elektronik, kendala dalam fasilitas untuk pemilih berkebutuhan khusus, dan permasalahan teknis dalam prosedur pemilihan (Juliman, 2017). Oleh karena itu, sosialisasi menjadi instrumen yang vital dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilihan E-Voting.

Pada tahun 2022, Kabupaten Pringsewu menjadi pionir dengan menerapkan metode E-Voting dalam pemilihan kepala pekon (Pilkakon) di 19 pekon secara serentak. Inovasi ini menjadi yang pertama dilaksanakan di Provinsi Lampung dan pertama di Indonesia yang menggunakan E-KTP sebagai kartu identitas pemilih sekaligus kartu tapping mesin pemilihan. Pelaksanaan pemilihan E-Voting ini terbilang berhasil tanpa adanya sengketa hasil, sehingga 19 Kepala Pekon terpilih dapat dilantik. Sosialisasi E-Voting oleh panitia pemilihan kepala pekon memiliki peran krusial dalam memastikan suksesnya proses demokrasi tingkat pekon.

Sosialisasi oleh panitia pemilihan kepala pekon perlu memfokuskan pada prosedur dan tata cara pemilihan kepala desa agar semua warga desa memahami langkah-langkah yang harus diikuti, terutama karena ini adalah kali pertama sistem E-Voting digunakan. Informasi tentang kriteria calon, persyaratan pencalonan, serta hak dan kewajiban pemilih juga perlu disampaikan secara jelas. Selain itu, penting untuk menyosialisasikan jadwal pelaksanaan pemilihan agar warga dapat mengatur waktu dan partisipasi mereka secara optimal.

Dalam konteks komunikasi politik, sosialisasi program E-Voting menjadi suatu fungsi komunikasi persuasif. Sosialisasi ini berperan memberitahukan atau menerangkan muatan persuasif terkait metode pemilihan baru ini. Sosialisasi oleh penyelenggara pemilu menjadi faktor kunci dalam membentuk pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap inovasi ini. Komunikasi politik dalam konteks ini merupakan proses penyampaian pesan politik yang terjadi saat fungsi-fungsi lainnya dijalankan, termasuk sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan, dan adjudikasi peraturan (Rush dan Althoff, 1997).

Berikut daftar pekon yang melaksanakan pilkakon serentak secara E-Voting ;

**Tabel 1.2**

Kecamatan	Pekon
Gadingrejo	Pekon Blitarejo, Pekon Kediri, Pekon Wonodadi, Pekon Wates
Adiluwih	Waringinsari Timur, Sinar Waya
Banyumas	Pekon Nusawungu, Pekon Waya Krui
Pardasuka	Pekon Sidodadi
Ambarawa	Pekon Tanjung Anom, Pekon Ambarawa Barat
Pagelaran	Pekon Jati Agung, Pekon Sukaratu, Pekon Sukawangi, Pekon Bumiratu
Pagelaran Utara	Pekon Neglasari
Sukoharjo	Pekon Sukoharjo I, Pekon Waringinsari Barat, Pekon Keputran

Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai penyelenggara pemilihan kepala pekon telah melaksanakan sosialisasi sistem E-Voting dengan mengadopsi beberapa pola dan tahapan. Tahapan pertama melibatkan sosialisasi kebijakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan (PMP) Kabupaten Pringsewu bersama dengan vendor Smart Village kepada pemerintah tingkat kecamatan hingga tingkat pekon. Sosialisasi ini mencakup pemahaman terkait Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala pekon. Dalam aspek teknis, pemilihan E-Voting dijelaskan melalui video tutorial dan simulasi, selanjutnya, dilakukan sosialisasi langsung ke masyarakat oleh Dinas PMP bekerjasama dengan panitia pemilihan di tingkat kecamatan dan pekon. Sosialisasi pada tahap ini dilaksanakan dengan mengundang masyarakat ke balai pekon untuk memberikan pemahaman secara langsung. Selain itu, aparatur pekon juga melakukan sosialisasi secara organik di wilayah terkecil sampai

tingkat RT. Sosialisasi tidak hanya terbatas pada pertemuan langsung, tetapi juga melibatkan media massa dan media sosial. Inisiatif ini mencakup siaran radio, pemanfaatan koran, iklan Instagram, dan penggunaan broadcast di grup WhatsApp. Sosialisasi melalui media tersebut menjadi penting mengingat perbedaan signifikan antara pemilihan secara mencoblos dan pemilihan menggunakan perangkat elektronik yang memiliki mekanisme teknis yang lebih kompleks.

Penelitian tentang panitia penyelenggara pemilihan menunjukkan bahwa sinergisitas Pemerintah Daerah (Pemda) yang mendukung langkah sosialisasi, serta komunikasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) kepada masyarakat dan pihak lain, menjadi faktor pendukung utama pada keberhasilan penyelenggaraan pemilihan (Sumanggusong dan Rusak, 2017).

Dalam konteks sosialisasi E-Voting, pemahaman terhadap pola penyampaian pesan menjadi krusial. Terutama, mengingat bahwa penyebaran informasi pada pemilihan Kepala Pekon melibatkan penggunaan teknologi digital, yang merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat pekon. Sebagaimana disoroti oleh Safitri dan rekan-rekan (2019), proses komunikasi dalam konteks ini dapat dianggap setara dengan proses difusi. Penerapan prinsip difusi inovasi menjadi kunci, di mana penyampaian pesan tidak hanya berperan sebagai alat informasi, melainkan juga sebagai sarana untuk menciptakan perubahan positif dalam perilaku dan pandangan audiens terhadap inovasi yang diperkenalkan..

Melihat kesuksesan Kabupaten Pringsewu dalam Pemilihan Kepala Pekon melalui metode E-Voting, penting untuk diakui bahwa proses sosialisasi menjadi faktor krusial yang berdampak signifikan pada kelancaran dan hasil pemilihan tersebut. Mengingat dinamika yang muncul dan kompleksitasnya situasi, penelitian ini tertarik untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait dengan proses sosialisasi E-Voting pada pemilihan kepala pekon di Kabupaten Pringsewu. Dalam upaya ini, penelitian akan mengadopsi teori difusi inovasi sebagai kerangka konseptual, memberikan landasan yang kuat untuk menyelidiki aspek-aspek sosialisasi yang memainkan peran penting dalam penerimaan dan implementasi metode E-Voting tersebut..

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kegiatan sosialisasi E-Voting pada pemilihan kepala pekon di Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana kekurangan dan kelebihan sosialisasi E-Voting pada pemilihan kepala pekon di Kabupaten Pringsewu?
3. Bagaimana pola penyampaian pesan yang terbentuk dalam sosialisasi E-Voting pada pemilihan kepala pekon di Kabupaten Pringsewu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana kegiatan sosialisasi E-Voting pada pemilihan kepala pekon di Kabupaten Pringsewu
2. Mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan sosialisasi E-Voting pada pemilihan kepala pekon di Kabupaten Pringsewu
3. Mengetahui bagaimana pola penyampaian pesan yang terbentuk dalam sosialisasi E-Voting pada pemilihan kepala pekon di Kabupaten Pringsewu

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pola komunikasi yang efektif dalam sosialisasi E-Voting pada pemilihan kepala pekon.
2. Menyediakan informasi yang relevan bagi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dalam mempersiapkan sosialisasi E-Voting.
3. Menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon dengan metode E-Voting di Kabupaten Pringsewu dan daerah lainnya di Indonesia.
4. Mendorong penelitian lanjutan dalam bidang komunikasi politik dan E-Voting di Indonesia.

## 1.5 Kerangka Pemikiran



**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**

Sosialisasi dalam konteks penyelenggaraan pemilihan E-Voting merupakan usaha untuk memperkenalkan sistem pemilihan yang mencakup berbagai aspek, seperti jadwal tahapan, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), prosedur pemilihan, penutupan, dan landasan hukum, kepada masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat memahami secara menyeluruh tentang proses pemilihan, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat, serta mengurangi potensi timbulnya sengketa dalam pemilihan tersebut.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon melalui E-Voting, Pemerintah Kabupaten Pringsewu, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinas PMP), bekerja sama dengan pihak kecamatan dan pekon untuk melakukan sosialisasi secara intensif sebelum pemilihan berlangsung. Sosialisasi ini menjadi sangat penting karena masyarakat Kabupaten Pringsewu dihadapkan pada mekanisme pemilihan E-Voting untuk pertama kalinya. Berbagai tindakan sosialisasi dilakukan dengan memanfaatkan saluran-saluran yang tersedia dan dianggap dapat menjangkau masyarakat secara langsung. Hal ini menjadi urgensi tersendiri untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teori difusi inovasi untuk menjelaskan bagaimana pola penyampaian pesan pada sosialisasi E-Voting disebarkan. Teori ini membantu dalam memahami bagaimana inovasi,

khususnya sistem E-Voting, disampaikan dan dikomunikasikan melalui berbagai saluran kepada anggota masyarakat dalam konteks sistem sosial yang ada. Penelitian ini akan mengungkap proses sosialisasi, pola komunikasi yang digunakan, serta dinamika komunikasi dalam penerapan E-Voting pada pemilihan kepala pekon di Kabupaten Pringsewu.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai rujukan dan tolak ukur pembandingan peneliti untuk menyusun sebuah penelitian. Peneliti harus mampu mempelajari penelitian sebelumnya yang berguna sebagai bahan kajian dan juga menghindari duplikasi serta pengulangan penelitian. (Ardiansyah, 2016)

**Tabel 2.1 Penelitian Sejenis Penelitian Sejenis**

No	Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	“Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar” (Desak Putu Adistyananingsih dan Anak Agung Gede Oka Wisnumurti (2019)	Mengetahui strategi apa yang paling dominan dilakukan KPU Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018	Kualitatif deskriptif	strategi komunikasi yang dilakukan KPU, Kabupaten Gianyar Meningkatkan partisipasi politik dan efektif karena KPU telah berkerja secara maksimal dan tepat sasaran sehingga dirasa ada peningkatan dari tahun sebelumnya periode 2013. Namun masih ada strategi lainnya yang perlu diterapkan berupa strategi komunikasi berbasis era digital, yang jangkauannya lebih luas, sosialisasi melalui media sosial karena penyebaran informasi menggunakan media sosial lebih cepat.

2	<p>“E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi” (Loura Hardjaloka &amp; Varida Megawati Simarmata (2011)</p>	<p>Mengetahui asas-asas pemilu yang harus dipenuhi dalam kerangka E-Voting dan juga analisis antara kebutuhan vs. kesiapan masyarakat dalam menggunakan E-Voting</p>	<p>Kajian Pustaka</p>	<p>Dengan tetap dipertahankannya Pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka bagi daerah-daerah di Indonesia yang belum dapat menerapkan sistem E-Voting karena keterbatasan sarana dan prasarana masih tetap dapat melakukan pemilihan secara konvensional yakni mencoblos atau mencontreng. Namun, bagi daerah-daerah yang telah mampu mengadopsi E-Voting maka untuk memajukan bangsa, E-Voting dapat dilakukan dengan syarat kumulatif yakni tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta memenuhi syarat lainnya yang diperlukan. Dengan demikian, tidak menimbulkan kekosongan hukum bagi daerah yang belum siap untuk melakukan E-Voting.</p>
3	<p>“Penerapan <i>E-Voting</i> Dalam Pemilihan Wali Nagari Di</p>	<p>Mengetahui bagaimana penerapan E-Voting pada</p>	<p>Penelitian kualitatif dengan jenis dan</p>	<p>Adapun penerapan E-Voting dalam pemilihan di Nagari Kamang Hiilia tahun 2017 sudah</p>

	Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017”	Pemilihan wali nagari Kamang Hilia.	tipe studi kasus.	dilaksanakan secara maksimal, meskipun ada beberapa kendala. Seperti sudah terpenuhinya indikator Accuracy, Privacy, Invulnerability dan Verifiability akan tetapi pada indikator Convenience, Flexibility masih belum terlaksana dengan baik dan pada indikator Moblity tidak terpenuhi karena metode yang dipakai tidak bersifat jarak jauh atau tidak menggunakan internet.
4	Difusi Inovasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Akan Kelestarian Lingkungan	Mengungkapk an model konseptual yang sedang disebarkan oleh komunitas kepada masyarakat RW 13 Tamansari yaitu berupa gagasan yang bernama gerakan Cikapundung bersih	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori difusi inovasi sebagai alat konfirmasi	Dalam mengkomunikasikan gagasan kepada masyarakat, komunitas menggunakan dua saluran komunikasi (intrapersonal dan media massa) untuk mempermudah masyarakat mencari informasi tentang gagasan gerakan Cikapundung bersih, menunjukkan empat RT dapat menerima dan mengadaptasi gagasan yang disebar kan oleh komunitas, sementara tiga RT yang telah mencoba kegiatan dari komunitas memilih untuk tidak lagi mengadaptasi.

Berikut table Gap Research atau kebaruan yang peneliti angkat dari penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan:

**Tabel 2.2 Research Gap Research Gap**

No	Judul Penelitian	Research Gaph
1	“Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianyar” (Desak Putu Adistyananingsih dan Anak Agung Gede Oka Wisnumurti (2019)	Penelitian ini membahas strategi komunikasi dalam mensosialisasikan pemilihan namun dalam kajian ini pemilihan dilaksanakan secara konvensional tidak E-Voting.
2	“E-Voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong E-Demokrasi)” (Laura Hardjaloka & Varida Megawati Simarmata (2011) )	Peneliti mengutip penelitian ini untuk mendapatkan legitimasi hukum dan kondisi pemilihan E-Voting meskipun tidak berkaitan dengan unsur kajian komunikasi
3	“Penerapan <i>E-Voting</i> Dalam Pemilihan Wali Nagari Di Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2017” (Fery Anggara dkk(2021)	Berbeda dengan objek pola komunikasi yang peneliti angkat, penelitian ini membahas secara umum hasil dari penerapan pemilihan secara E-Voting
4	“Difusi Inovasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Akan Kelestarian Lingkungan.	Penelitian ini menggunakan analisis teori difusi inovasi namun secara spesifik membahas penyebaran gerakan lingkungan, bukan proses pemilihan

## **2.2 Sosialisasi**

### **2.2.1 Pengertian Sosialisasi**

Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi adanya keterlibatan individu-individu sampa dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi.

Pengertian sosialisasi menurut Charles R Wright yang dikutip oleh sutaryo adalah “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan sampai tingkat tertentu norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain”. Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas terdapat persamaan mengenai sosialisasi, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi, dalam sosialisasi terdapat interaksi antara manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena kedua sifat dari manusia yang bertentangan satu sama lain, disitu pihak ingin bekerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik mengenai hubungan sosialisasi.

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan

dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya (Sutaryo, 2004).

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Menurut Peter L Berger dan Luckman terdapat 2 jenis sosialisasi yaitu:

- a. Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak.
- b. Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat kerja. Dalam keduanya institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dan jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan dan diatur secara formal (Sudarsono, 2017)

Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Terdapat empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa dan lembaga pendidikan sekolah. Akan tetapi media dalam proses sosialisasi merupakan sarana tambahan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Lane bahwa dasar sosialisasi dalam keluarga dan peran media massa hanyalah bersifat tambahan (Susanto, 1992).

### **2.2.2 Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik, seperti yang didefinisikan oleh Raga Maran (2001), merujuk pada suatu proses di mana individu diperkenalkan kepada sistem politik dan bagaimana mereka merespons serta merespons gejala politik. Fokus dari pandangan ini bukan hanya pada pemahaman struktur politik, tetapi juga pada kemampuan individu untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Melalui tinjauan pustaka ini, kita akan mengeksplorasi

beberapa aspek kunci terkait teori sosialisasi politik dan dampaknya terhadap partisipasi politik yang bertanggung jawab.

Sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan, interaksi sosial, tingkah laku sosial, suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksireaksinya. Sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan di mana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi politik merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial lainnya, karena dalam sosialisasi politik adanya keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi. Pengertian sosialisasi politik menurut Charles R. Wright adalah:

“Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapanharapan orang lain” (dalam Sutaryo, 2005:156).

Sosialisasi merupakan proses belajar, pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar mengenai norma-norma untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Peter L. Berger bahwa sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar m menjadi anggota masyarakat (dalam Sutaryo, 2005:156).

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan mengenai sosialisasi politik, terletak pada objek dari sosialisasi yaitu masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Sosialisasi politik juga terdapat interaksi antar manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, di satu pihak ingin berkerjasama, di pihak lain cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia

untuk dapat berkuasa. Kekuasaan merupakan kajian dan konsep dari politik. Mengenai hubungan sosialisasi dengan politik terletak pada objek dari sosialisasi, dapat diartikan bahwa pengertian sosialisasi sama dengan pengertian dari sosialisasi politik. Fred. Greenstein menjelaskan pengertian sosialisasi politik dalam arti sempit dan luas, yaitu:

- 1) Penanaman informasi yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan intruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab.
- 2) Semua usaha untuk mempelajari, baik formal maupun informal, disengaja ataupun tidak direncanakan, pada setiap tahap siklus kehidupan, dan termasuk didalamnya tidak secara eksplisit masalah belajar saja, akan tetapi juga secara nominal belajar bersikap mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan. (dalam Rush & Althoff, 2002:35-36)

Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai nilai-nilai dan norma-norma adalah inti dari sosialisasi yang dilakukan oleh badan-badan atau kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan pada

Sosialisasi politik melibatkan pembelajaran individu tentang struktur dan dinamika sistem politik. Ini mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai politik, ideologi, dan peran lembaga politik. Melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan politik, individu membentuk pandangan dan sikap politik mereka. Teori sosialisasi politik menekankan pentingnya reaksi individu terhadap gejala politik. Ini mencakup bagaimana individu menafsirkan informasi politik, merespons peristiwa politik, dan membentuk sikap terhadap isu-isu politik tertentu. Reaksi ini dapat memengaruhi tingkat partisipasi dan keterlibatan politik individu. objek sosialisasi. Menurut David Easton dan Jack Dennis sosialisasi politik adalah suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi dan pola tingkah lakunya (dalam Rush & Althoff, 2002:36).

Sosialisasi politik menurut Syahril Syarbaini dkk ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik pada anggota masyarakat (Syahril Syarbaini dkk, 2004:71). Masyarakat melalui proses sosialisasi politik inilah memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup melalui pendidikan formal dan informal atau

tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga atau tetangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Sosialisasi politik bertujuan agar individu tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, kemampuan untuk mengambil keputusan informasi politik, serta tanggung jawab terhadap efek dari partisipasi politik mereka. Pendidikan dan media berperan penting dalam proses sosialisasi politik. Sistem pendidikan menyediakan wadah untuk pembelajaran formal tentang sistem politik, sementara media memberikan informasi dan membentuk opini politik. Kedua faktor ini dapat membentuk persepsi individu terhadap politik dan memengaruhi partisipasi mereka.

Konteks sosial dan kultural juga berperan dalam sosialisasi politik. Nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial dapat mempengaruhi bagaimana individu membentuk sikap politik mereka. Faktor-faktor ini menciptakan kerangka kerja untuk interpretasi politik yang membentuk pola partisipasi politik. Tingkat partisipasi politik dan tingkat pemahaman politik yang tinggi, hasil dari sosialisasi politik yang efektif, dapat membawa dampak positif pada kualitas demokrasi suatu negara. Individu yang terlibat secara aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik dapat menjadi tulang punggung demokrasi yang sehat.

Melalui pemahaman tentang teori sosialisasi politik, kita dapat mengenali kompleksitas faktor-faktor yang membentuk partisipasi politik individu. Dengan memberikan penekanan pada partisipasi politik yang bertanggung jawab, teori ini memberikan kontribusi penting pada pemahaman kita tentang peran individu dalam mewujudkan sistem politik yang inklusif dan berdaya.

### **2.2.3 Jenis – Jenis Sosialisasi Politik**

Sosialisasi apabila dikaitkan dengan prosesnya, terdapat jenis-jenis sosialisasi. Susanto membagi jenis sosialisasi menjadi dua, yaitu:

- 1) Sosialisasi primer, sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi ini berlangsung pada saat kanak-kanak
- 2) Sosialisasi sekunder, adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. (Susanto,1992:32)

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani proses kehidupan, dan diatur secara formal.

Jenis-jenis sosialisasi berdasarkan tipenya menurut Syahrial Syarbaini dkk, terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Sosialisasi formal, yaitu sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- 2) Sosialisasi informal, yaitu sosialisasi yang bersifat kekeluargaan, pertemanan atau sifatnya tidak resmi. (Syarbaini dkk, 2004:73)

Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintahan, disebut sosialisasi formal karena lembaga tersebut mempunyai kewenangan karena mempunyai landasan hukum dan materi yang disampaikan merupakan kebijakan pemerintah. Sosialisasi yang bersifat informal lebih sering dilakukan tanpa disadari. Jenis sosialisasi formal merupakan jenis yang sering digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan program atau kebijakan yang baru dibuat kepada masyarakat.

#### **2.2.4 Syarat – Syarat Terjadi Sosialisasi Politik**

Sosialisasi merupakan sistem dalam kehidupan masyarakat yang sangat penting. Berdasarkan hal tersebut, sosialisasi politik memberikan dua kontribusi fundamental bagi kehidupan masyarakat, yaitu:

- 1) Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat.
- 2) Kedua, memungkinkan lestarnya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu (Susanto,1992:39)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa melalui sosialisasi politik masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan generasi untuk kelestarian kehidupan selanjutnya. Selain itu, terdapat faktor lain yang menunjang proses sosialisasi politik yaitu faktor lingkungan, dimana didalamnya interaksi sosial. Selain faktor lingkungan terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi sosialisasi, di antaranya adalah:

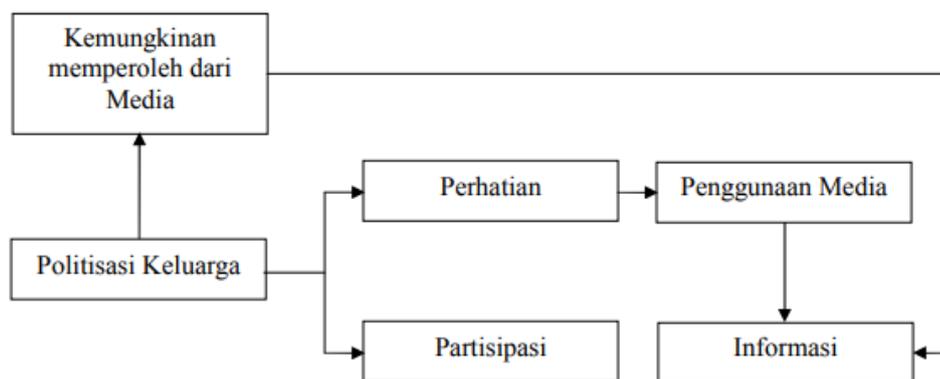
- 1) Apa yang disosialisasikan, merupakan bentuk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat berupa nilai, norma dan peran.
- 2) Bagaimana cara mensosialisasikan, melibatkan proses pembelajaran.
- 3) Siapa yang mensosialisasikan, institusi, mass-media, individu dan kelompok. (Susanto,1992:45)

Michael Rush dan Phillip Althoff berpendapat bahwa setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Proses keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh:

- 1) Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama. Selain itu keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan memberi pengaruh sebagai agen sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat.
- 2) Materi sosialisasi politik, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat.
- 3) Mekanisme sosialisasi politik, di bagi menjadi tiga yaitu, imitasi, instruksi, motivasi.
- 4) Pola sosialisasi politik proses yang terus berkesinambungan, untuk mengetahui proses sosialisasi, yang terdiri dari Badan atau instansi yang melakukan proses sosialisasi, hubungan antara badan atau instansi tersebut dalam melakukan proses sosialisasi (Rush & Althoff, 2002:37).

Agen sosialisasi merupakan pemeran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi politik untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma- norma yang terdapat dalam materi sosialisasi politik. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Apabila proses-proses tersebut dapat tersusun, maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi politik dapat dengan tepat disampaikan ke sasaran sosialisasi. Agen sosialisasi politik adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Terdapat empat agen sosialisasi yang utama, yaitu

keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. Akan tetapi media dalam proses sosialisasi politik merupakan sarana tambahan, hal tersebut sejalan dengan pendapat Lane bahwa dasar sosialisasi adalah keluarga dan peranan media massa hanyalah bersifat tambahan (dalam Susanto, 1992:163). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari gambar 2.1, yaitu sebagai berikut:



(Sumber: Susanto, 1992:163)

**Gambar 2.1 Peranan Media dalam Proses Sosialisasi Politik**

### 2.2.5 Penggunaan Media dalam Sosialisasi

Media massa, sebagai entitas yang mencakup televisi, radio, surat kabar, dan internet, memiliki peran yang tak terbantahkan dalam membentuk dan memengaruhi pemahaman individu terhadap dunia di sekitarnya. Dalam proses sosialisasi, media massa dapat digunakan sebagai penyedia informasi, dan penyampai pesan sesuai dengan tujuan penggunaannya dalam upaya membentuk pandangan sosial dan norma yang diterima oleh masyarakat. Media yang digunakan dengan masif dan konsisten menyampaikan suatu pesan akan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap penerima pesan. Seorang mengkomunikasikan pesan-pesannya melalui sebuah saluran kepada seorang penerima yang kemudian memberikan umpan balik kepada pengirim tersebut. Model komunikasi seperti ini dikenal sebagai teori peluru atau jarum suntik. Dalam model ini, komunikator menggunakan media massa untuk menembaki atau menyuntik khalayak dengan pesan-pesan persuasif yang tidak dapat mereka tahan. Proses seperti ini lazim digunakan oleh sebuah pemerintahan misalnya dalam memberitakan dan menyampaikan pesan kesehatan saat masa covid 19, hal itu

dinamakan proses satu arah, dari pemerintah kepada masyarakat secara hierarkis ke bawah (Wardhani, 2002).

Melalui mediumnya, media massa memberikan jendela ke dunia budaya dan nilai masyarakat. Program televisi, film, dan berita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi perantara yang signifikan dalam membentuk norma sosial dan budaya. Pengenalan individu pada budaya melalui media massa menjadi tahap awal dalam proses pembentukan pemahaman sosial. Tak hanya itu, media juga menjadi arsitek utama dalam konstruksi identitas sosial. Representasi tokoh dan cerita di media membentuk persepsi individu terhadap diri mereka sendiri. Identifikasi dengan karakter tertentu atau kelompok dalam media dapat memainkan peran kunci dalam membentuk dan memperkuat identitas sosial individu.

Media massa bukan hanya tempat mencari informasi, melainkan juga berfungsi sebagai sumber model perilaku yang dapat diadopsi oleh individu. Ketika media menampilkan suatu kegiatan atau perilaku tertentu, hal ini dapat menjadi acuan bagi penonton. Misalnya, dalam pengiklanan jual beli online yang marak belakangan ini, individu cenderung meniru atau mengadopsi perilaku yang mereka saksikan karena dalam pengiklanannya ditampilkan pesan kebutuhan seperti lebih murah, aman dan terpercaya. Proses ini dapat terjadi tanpa disadari, di mana individu secara alami menyerap dan meniru apa yang mereka lihat dalam media.

Perilaku yang diadopsi oleh individu melalui media massa dapat memengaruhi pembentukan norma sosial. Jika perilaku tertentu secara konsisten ditampilkan dan diterima dalam media, hal ini dapat membentuk persepsi masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai norma atau perilaku sosial yang dapat diterima. Media massa, dengan demikian, tidak hanya mencerminkan norma sosial tetapi juga berpotensi menjadi agen yang membentuknya. Media massa juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas sosial individu dan kelompok. Representasi karakter, kelompok, atau kisah tertentu dalam media dapat membentuk identifikasi individu dengan entitas tersebut. Dalam konteks globalisasi, media

juga berkontribusi pada pertukaran budaya, memengaruhi cara individu memahami dan mengadopsi elemen-elemen budaya dari berbagai latar belakang.

Perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah mengubah cara individu berinteraksi dengan media. Media sosial memungkinkan individu untuk tidak hanya menjadi penonton pasif tetapi juga peserta aktif dalam proses sosialisasi. Interaksi sosial yang intens di platform ini dapat mempercepat penyebaran informasi dan project tertentu, dimana sebuah wacana ataupun inovasi akan dapat tersampaikan dengan natural karena di sampaikan dari individu ke individu lainnya. Sementara media massa memiliki peran yang signifikan dalam sosialisasi, perlu diperhatikan bahwa ada tantangan dan pertimbangan etis. Isu seperti stereotip, representasi yang tidak seimbang, dan potensi manipulasi informasi harus diakui dan diatasi untuk memastikan bahwa peran media dalam sosialisasi bersifat positif dan mendukung pembentukan masyarakat yang inklusif dan beragam.

Peran media massa dalam sosialisasi tidak dapat diremehkan. Media tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi katalisator dalam membentuk perilaku, norma sosial, dan identitas masyarakat. Sementara media memainkan peran penting dalam membawa informasi dan budaya kepada audiens yang luas, penting untuk mengenali dampaknya dan mempromosikan konsumsi media yang kritis dan bertanggung jawab untuk mendukung proses sosialisasi yang sehat.

### **2.2.6 Penyampaian Pesan dalam Sosialisasi**

Sosialisasi dalam pemilihan kepala pekon merupakan salah satu implementasi penerapan demokrasi di level desa yaitu dengan memberi akses informasi dan pendidikan dalam mewujudkan partisipasi pemilih yang optimal. Pemilih yang memiliki pengalaman mendapat pendidikan politik dan pemilu yang terbuka, mempengaruhi proses demokrasi yang berlangsung. Naik turunnya demokrasi sangat tergantung pada struktur dan ciri dari sistem komunikasi. Tolok ukur demokrasi adalah kriteria komunikasi, yakni adanya wacana publik, pertukaran pendapat, gagasan, dan perbedaan secara terbuka, arus informasi yang tidak

dibatasi (kebebasan pers), serta hak dan kebebasan untuk memilih. (Trenggono, 2004).

Penyampaian pesan pada sosialisasi pemilihan kepala pekon melalui sistem e-voting memegang peran krusial dalam menginformasikan dan memotivasi partisipasi warga dalam proses demokrasi. Pesan-pesan yang disampaikan harus mencakup informasi terkait tata cara e-voting, langkah-langkah registrasi, dan teknis penggunaan platform elektronik. Penyampaian pesan juga harus menekankan keamanan dan keandalan sistem e-voting untuk memastikan kepercayaan warga terhadap proses pemilihan secara online.

Komunikasi dalam sosialisasi pemilihan kepala pekon melalui e-voting juga perlu menyoroti keuntungan dari penggunaan teknologi ini, seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan transparansi. Pemaparan mengenai bagaimana e-voting dapat meningkatkan partisipasi warga, terutama di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi digital, menjadi aspek penting dalam penyampaian pesan.

Dalam konteks e-voting, penyampaian pesan juga harus memberikan informasi tentang langkah-langkah keamanan dan privasi data yang diimplementasikan oleh sistem, dengan tujuan menjaga integritas pemilihan dan melindungi informasi pribadi pemilih. Dengan menyampaikan pesan yang menyeluruh dan transparan, panitia pemilihan dapat memastikan bahwa warga pekon memahami dan percaya pada inovasi teknologi ini, sehingga dapat meningkatkan partisipasi serta menghasilkan proses pemilihan kepala pekon yang inklusif dan efisien.

Menurut Rogers 1998, ada beberapa kunci sukses dalam memperkenalkan ide atau teknologi baru dalam penyampaian pesan sosialisasi, hal ini ia ungkapkan pada penjelasannya mengenai difusi inovasi. Dimana pada tahap paling awal harus memperhatikan bagaimana pesan harus disesuaikan dengan karakteristik audiens, mulai dari inovator yang cenderung terbuka terhadap perubahan hingga laggard yang lebih skeptis. Menyoroti keunggulan dan keunikannya bagi inovator, serta menekankan kecocokan dengan nilai dan norma yang berlaku bagi majority dan laggard, menjadi strategi penting dalam penyampaian pesan. Saluran komunikasi juga perlu dipilih dengan cermat, memanfaatkan network dan

komunikasi interpersonal yang dapat mempercepat proses penyebaran pesan. Mengidentifikasi influencer dalam komunitas dan melibatkan mereka dalam penyampaian pesan dapat memperkuat akseptabilitas ide atau inovasi. Dengan menerapkan prinsip difusi inovasi, penyampaian pesan tidak hanya menjadi alat informasi, tetapi juga sarana untuk menciptakan perubahan positif dalam perilaku dan pandangan audiens terhadap inovasi yang diperkenalkan

### **2.3 Kegiatan Sosialisasi E-Voting dalam Pemilihan Kepala Pekon**

Panitia Pemilihan Kepala Pekon dibentuk untuk melaksanakan pemilihan Kepala Pekon di Kabupaten Pringsewu pada tanggal 18 Mei 2022. Panitia Pemilihan Kepala Pekon mengadakan Sosialisasi E-Voting kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu pada dasarnya merupakan proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungannya, sebagai bentuk upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat. Artinya sosialisasi E-Voting yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon merupakan proses penyesuaian terhadap nilai-nilai baru atau dianggap atau baru dikenal oleh masyarakat. E-Voting merupakan alat pemungutan suara yang sudah menggunakan teknologi informasi agar output yang didapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Menurut Rush dan Althoff dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi Politik bahwa definisi sosialisasi, yaitu:

“Sosialisasi politik adalah proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi diantara kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politiknya yang relevan. Pengalaman tersebut tidak perlu khas bersifat politik akan tetapi pengalaman tersebut disebut relevan karena memberi bentuk terhadap tingkah laku politiknya” (Rush dan Althoff, 2011:47).

Definisi tersebut memiliki makna bahwa sosialisasi itu belajar mengenai pola-pola tindakan. Dimana dalam suatu tindakan terdapat unsur-unsur berupa nilai-nilai agar nilai-nilai tersebut diketahui oleh masyarakat maka diperlukan proses pengenalan melalui interaksi yang dilakukan pihak yang memiliki peranan dalam status sosial yang lebih tinggi yaitu seperti pemerintah untuk mengenalkan sesuatu berupa program-program.

E-Voting merupakan penggunaan teknologi informasi yang canggih dalam proses pemungutan suara dalam hal pemilihan umum. E-Voting ini sudah banyak di implementasikan di negara-negara yang sudah di katakana maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Jerman, India. Untuk pertama kalinya E-Voting disosialisasikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Pringsewu bertepatan dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala pekon menggunakan sistem E-Voting. Definisi E-Voting menurut Tim Warta Ekonomi dalam buku yang berjudul *Jawara-Jawara Pengaplikasi e-Government*, yaitu:

“ E-Voting atau electronic voting adalah penggunaan teknologi informasi (TI) terutama komputer pada saat masyarakat menyalurkan aspirasinya dalam memilih entah itu kepala dusun, bupati, gubernur, presiden atau wakil-wakil rakyat baik di DPRD atau DPR” (Tim Warta Ekonomi, 2010:20-21).

Definisi diatas bermakna bahwa perkembangan modernisasi disetiap lini pemerintahan di Indonesia tidak dapat terelakkan lagi dengan adanya E-Voting merupakan salah satu cara menuju proses modernisasi tersebut. Proses pemungutan suara yang selama ini dilakukan masih bersifat tradisional. Di era globalisasi ini proses pemungutan suara tersebut sudah mengarah pada proses pemungutan suara secara digital dengan menggunakan alat berbasis teknologi informasi seperti komputer untuk menyelenggarakan proses pemungutan suara yang efektif dan efisien.

Fenomena pemilihan Kepala Pekon dengan metode E-Voting di Kabupaten Pringsewu dapat ditinjau dengan teori difusi inovasi. Pemilihan menggunakan metode E-Voting menjadi pengalaman pertama bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu, bahkan lebih luasnya masyarakat Provinsi Lampung, sehingga hal tersebut merupakan bagian dari inovasi atau perubahan yang pasti memiliki dinamika masyarakat.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena secara holistik, menggunakan kata-kata tanpa mengandalkan angka, dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan karakteristik populasi atau daerah tertentu (Nazir, 2003:54).

Selain itu, penelitian ini meminjam tahapan dari teori difusi inovasi sebagai kerangka kerja, yaitu tahap awal, proses dan konsekuensi

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pringsewu, Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai dari Bulan Mei 2023.

#### **3.3 Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan diolah oleh peneliti sendiri. Data ini dapat berupa opini individu atau kelompok, hasil observasi, atau informasi yang diperoleh melalui wawancara (Ruslan, 2003). Data primer dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen terkait serta hasil wawancara dengan Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak diolah oleh peneliti secara langsung. Data ini dapat berupa catatan, laporan, atau dokumentasi yang telah dipublikasikan oleh lembaga atau instansi lain. Data

primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan yang dimanfaatkan.

### 3.4 Informasi Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, atau orang yang diwawancarai, serta dokumen (Moelong, 2004), adalah Pejabat Dinas PMP Kabupaten Pringsewu dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon, Masyarakat Pemilih.

Berikut daftar subjek penelitian:

**Tabel 3.1 Subjek Penelitian**

NO	NAMA	JABATAN/PERAN
1	Tri Haryono,S.IP.,MM	Sekretaris Dinas PMP Kabupaten Pringsewu
2	Budi Santoso	Kepala Bidang Dinas PMP Kabupaten Pringsewu
3	Aziz Mahendra	Panitia Pemilihan Kepala Pekon, Pekon Wonodadi Kecamatan Gading Rejo
4	Sugeng Kurniadi	Panitia Pemilihan Kepala Pekon,Pekon Kaputran Kecamatan Sukoharjo
5	Indra Kusuma	Masyarakat Desa Wonodadi

- b. Sumber data pelengkap sebagai data pendukung yaitu foto dokumentasi serta dokumen yang ada di Badan Penyelenggara Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Pringsewu.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, fakta dan informasi yang jelas dan berkaitan dengan judul, maka penulis menggunakan metode :

## 1. Wawancara

Wawancara mendalam adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan lengkap dan mendalam. Wawancara ini tidak hanya bisa dilakkan sekali saja, tetapi harus dilakukan secara berulang-ulang agar mendapatkan data yang akurat serta terjamin. Wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atas respon informan. Artinya informan bebas memberikan jawaban. Sehingga periset harus mampu membuat informan bersedia memberikan jawaban yang lengkap, mendalam dan bila perlu tidak ada data yang disembunyikan.

Wawancara mendalam mempunyai karakteristik yang unik, diantaranya :

- a) Digunakan untuk subjek yang sedikit atau bahkan satu dua orang saja.
- b) Menyediakan latar belakang secara detail mengenai alasan informan memberi jawaban tertentu.
- c) Wawancara mendalam tidak hanya memperhatikan jawaban verbal saja, tetapi juga memperhatikan respons-respons non verbal informan.
- d) Wawancara mendalam ini biasanya dilakukan dengan waktu yang lama dan berkali-kali.
- e) Memungkinkan memberikan pertanyaan berbeda atas informan yang satu dengan informan yang lain.
- f) Wawancara mendalam sangat dipengaruhi oleh iklim wawancara. Iklim wawancara yakni suasana, kondisi saat melakukan wawancara. Sehingga dengan teknik wawancara ini peneliti bisa menerima langsung informasi yang diberikan dari informan penelitiandan dijadikan sebagai data untuk di olah menjadi hasil penelitian.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam dokumentasi ini peneliti memanfaatkan arsip-arsip dan dokumen, buku-buku, Koran, serta sumber bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.6 Validitas Data**

Penilaian kesahihan (validitas) riset terletak pada proses sewaktu periset turun ke lapangan mengumpulkan data sewaktu proses analisis intepretatif data . Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam peneilitian, dan data yang dikumpulkan akan dianalisis sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Besarnya posisi data maka, keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yaitu pemeriksaan dengan menggunakan triangulasi data.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas penjelasan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 92-99), yaitu:

#### **1. Reduksi data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang munculnya dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

#### **2. Penyajian data**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### **3. Kesimpulan atau Verifikasi data**

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konvigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung (Matthe B. Miles, 1992:15-19). Dalam penarikan kesimpulan ini berdasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Sehingga data dapat di pahami maksudnya.

### **3.8 Keabsahan Data**

Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Moelong, 2004). Empat macam triangulasi yaitu Triangulasi Sumber Data, Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan dan tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insight*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

## **V. SIMPULAN**

### **5.1 Simpulan**

#### **5.1.1 Proses Sosialisasi E-Voting**

Proses Sosialisasi E-Voting melibatkan berbagai tahapan yang mencakup persiapan awal, komunikasi intensif, dan adaptasi oleh masyarakat, pada tahap awal, Dinas PMP Kabupaten Pringsewu mempersiapkan strategi sosialisasi dengan menggunakan video tutorial untuk membuka wawasan masyarakat tentang inovasi E-Voting. Inovasi ini dipandang sebagai langkah menuju efisiensi dan efektivitas dalam pemilihan kepala pekon. Proses sosialisasi E-Voting didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh agama, pengurus masjid, dan pemerintahan desa. Kolaborasi dengan mereka membantu meyakinkan masyarakat bahwa E-Voting tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada sebelumnya. Dalam komunikasi, peran opinion leader diakui berperan penting dalam mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap inovasi. Saluran komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi E-Voting melibatkan media resmi pemerintah, seperti website pekon, siaran radio daerah, serta media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan langsung di tempat-tempat strategis seperti masjid dan TPS. Dimensi waktu memiliki peran penting dalam proses difusi inovasi. Persiapan inovasi E-Voting dimulai sejak 2019, dan regulasi yang mendukungnya diterbitkan pada tahun 2022. Sosialisasi teknis intensif dilakukan setelah regulasi tersebut diterbitkan.

### **5.1.2 Kelebihan dan Kekurangan**

Kelebihan:

1. Sosialisasi lebih mendalam dan masif karena dilakukan dari rumah-ke rumah secara langsung, dimana edukasi disampaikan dalam pemungutan E-KTP oleh RT
2. Sosialisasi yang menggunakan media massa dan media sosial memiliki jangkauan yang luas dan cepat, terlebih pada media sosial populer seperti WhatsApp, facebook, dan instargram
3. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam sosialisasi telah membantu proses sosialisasi memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat.

Kekurangan :

1. Penetapan waktu sosialisasi yang singkat mengakibatkan belum optimalnya pemahaman yang dimiliki oleh panitia e-voting
2. Kurangnya ketersediaan panitia dengan pemahaman yang memadai di setiap pekon dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam mengoperasikan sistem e-voting. Pemahaman yang terbatas tentang teknologi dapat menyebabkan kesulitan dalam memberikan panduan kepada pemilih.
3. Tidak adanya strategi khusus dalam mensosialisasikan e-voting kepada kaum lansia

### **5.1.3 Pola Penyampaian Pesan Sosialisasi E-Voting**

1. Dalam tahap pertama, Dinas PMP Kabupaten Pringsewu menjadi komunikator utama yang mengorganisir dan menyampaikan sosialisasi. Mereka secara formal mengundang pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kecamatan, pekon, Badan Himpun Pekon, dan Panitia, untuk menyampaikan kebijakan inovasi e-voting dan aspek teknis pemilihan.
2. Pada tahap kedua, Aparatur Pekon dan Panitia berkolaborasi dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Melalui pertemuan informal, mereka

menyampaikan pesan yang mencakup pemahaman tentang sistem pemilihan e-voting, aspek teknis pemilihan, dan membangun kepercayaan publik.

3. Tahap terakhir melibatkan para panitia dan tokoh masyarakat yang berkolaborasi dalam menjangkau masyarakat di 19 pekon. Dengan menggunakan kombinasi pola sosialisasi massal, seperti media baliho, surat kabar, siaran radio, dan media sosial, serta pemanfaatan sarana keagamaan dan sekolah, mereka berupaya mencakup seluruh lapisan masyarakat pemilih. Pendekatan persuasif melalui kunjungan rumah ke rumah oleh pamong atau RT, sekaligus pendataan E-KTP pemilih, memberikan dimensi personal dan mendalam dalam menyampaikan pesan..
4. Kombinasi pola sosialisasi massal dan persuasif diharapkan dapat mencapai tujuan menyeluruh, yaitu mencakup seluruh masyarakat pemilih dan menciptakan kesuksesan dalam implementasi inovasi pemilihan melalui e-voting. Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, proses ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan..

## **5.2 Saran**

- a) Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan:
  1. Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus terus memantau dan meningkatkan peralatan dan infrastruktur E-Voting untuk mengatasi kendala teknis.
  2. Pelatihan yang intensif dan berkelanjutan harus diberikan kepada pelaksana pemilihan agar mereka lebih mahir dalam menggunakan teknologi E-Voting.
  3. Sosialisasi melalui tokoh-tokoh masyarakat dan pertemuan langsung dengan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk memastikan penerimaan yang lebih luas terhadap E-Voting.

4. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dapat mempertimbangkan untuk menggandeng pihak swasta atau institusi pendidikan tinggi dalam mendukung pengembangan dan perbaikan teknis E-Voting.
- b) Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi yang lebih luas dengan sampel yang lebih besar yang mencakup berbagai konteks pemilihan kepala pekon di berbagai daerah. Selain itu, penelitian dapat mempertimbangkan dampak sosialisasi e-voting terhadap tingkat partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan transparansi, efektivitas, dan partisipasi dalam pemilihan kepala pekon melalui e-voting, pemahaman tentang pola komunikasi dalam proses sosialisasi e-voting sangat penting. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pemilihan e-voting yang lebih baik di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adistyananingsih, DP dan Wisnumurti, A, 2019. Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Meningkatkan Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gianya, *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 10 (2): 60–64
- Ardial, 2018. *Komunikasi Studi Kasus Tentang Fungsi Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Peawai*, Medan: lebang dan penulisan ilmiah aqli, 4.
- Bugin, 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Britha Mikkelsen, 2011. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan. Publisher, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Changara, H. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Cetakan Kedua. PT Raja
- . 2013. Perencanaan dan strategi komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Grafindo Persada. Jakarta
- Crab dan Lan, 1992. *Teori-teori Sosial Modern*, Jakarta: CV Rajawali, hlm.68.
- Darmawan dkk, 2016. Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Melalui Metode Electronic Voting (E-Voting) Di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VI No.1, Hlm.67-84*
- Darmawan Ihsan dkk, 2014. Memahami E-Voting: Berkaca dari Pengalaman Negara-negara Lain dan Jembrana (Bali), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 72.
- Effendy, O, 1986. Dimensi Dimensi Komunikasi, Bandung : Alumni
- . 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 11-14.
- Elvinaro Ardianto, 2014. Handbook of Public Relations: Pengantar Komprehensif Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014
- H.A.W.Widjaja. 2002. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hermawan. A, 2012. *Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama

- Juliman, 2017. Implementasi Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Metode Elektronik Voting (E-Voting) Di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, Volume 6 No. 3*
- Kriyantono.R, 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Morissan,MA. (2008). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mulyana, D. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung. PT Remaja Rosda Karya
- . 2004. *Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintas Budaya*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 3.
- Nurudin. 2008. *Komunikasi Propaganda*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong.L, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 157
- Perloff, Richard M. 2017. *The Dynamics of Persuasion Communication and Attitudes in The 21st Century Sixth Edition*. New York: Routledge
- Purwasito.A, 2002. *Komunikasi Multikultural*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Rahmat.Dj, 2005. *Psikologi Komunikasi, Bandung : PT Remaja Rosdakarya*, 48 dan 79.
- Ritzer dan George, 2010. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*,
- Romli, Khomsahrial. 2016. *KOMUNIKASI MASSA*. Jakarta: PT Grasindo, anggota Ikapi.
- Rondonuwu, S. A. 2018. Peranan Opinion Leader dalam Menyampaikan Pesan Tentang Pembangunan Desa di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*,
- Safitri dkk, 2019. Difusi Inovasi Program Pemerintah: Studi Komuni Pembangunan Pada Kelompok Wanita Tani Anugrah Kabupaten Padang Pariaman, *JISPO Volume 9 No. 2. Hlm. 4-5*
- Sendjaja, S. Djuarsa. 1994. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Setyabudi, Djoko. 2014. *Komunikasi Sosial*. Banten: Universitas Terbuka.
- Sudarsono.A dan Wijayanti.A, 2016. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Susanto, 1992. *Sosialisasi Pelayanan*, Malang: Universitas Kanjuruhan, hlm.163

- . 1992. Pengantar sosialisasi. Jakarta:Rajawali Press, hlm.39
- Susanto, Azhar. 2004. Sistem Informasi Manajemen:Konsep dan Pengembangan. Bandung:Lingga Jaya.
- Susanto, Astrid. 1992. Filsafat Komunikasi. Bandung:Binacipta.
- Syarbaini, Syahrial. 2004. Sosiologi dan Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sutaryo, 2004. *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.156
- Suyanto, 2006. *Sosialisasi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.121
- Trenggono. N, 2004. Konstruksi Komunikasi Internasional. *Mediator Volume 5 No 1*
- Wardhani 2002. Kontribusi Komunikasi pada Teori Pembangunan.*Mediator Volume 3 No 2*
- Wulansari dan Dewi, 2009. *Sosiologi : Konsep dan Teori*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm.174